

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang *Collaborative Governance* antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan LSM Lokal dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang baik antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Peran KPA Kabupaten Banyumas sebagai koordinator dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dalam melakukan koordinasi dengan LSM LPPSLH, yang dapat dilihat dari tingkat formalitas, tingkat durasi, tingkat fokus dan tingkat institusional.

B. Tingkat Formalitas yang ditekankan pada dua sub aspek yaitu kesepakatan yang terjalin dalam kolaborasi serta kontribusi dari kesepakatan sudah cukup baik. Kesepakatan yang terjalin antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH sudah cukup baik dilihat dari berjalannya peran dari masing-masing institusi dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya mengenai kontribusi dari kesepakatan, semua pihak baik KPA Kabupaten Banyumas dan LSM LPPSLH sudah berkontribusi dengan baik dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas hal tersebut dapat dilihat dari

kegiatan yang dilakukan bersama antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH dapat berjalan tanpa konflik.

- C. Tingkat Durasi yang ditekankan pada dua sub aspek yaitu Keberlangsungan kerjasama dan Estimasi pembagian waktu sudah cukup baik meskipun sifat kerjasama belum bersifat permanen. Keberlangsungan kerjasama yang terjalin antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH sudah sesuai merujuk pada SK Bupati Banyumas nomor 443/581/2015 tentang Pembentukan Komisi, Sekretariat dan Kelompok Kerja Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Banyumas. Selanjutnya mengenai estimasi pembagian waktu sudah cukup baik dalam berjalannya, meskipun tidak didasari atas dasar apa keberlangsungan kerjasama tersebut dilakukan.
- D. Tingkat Fokus yang ditekankan pada dua sub aspek yaitu target yang menjadi sasaran dan cara menentukan kelompok sasaran sudah sesuai dengan tujuan dari dilakukannya kolaborasi antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH yaitu untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas. Target yang menjadi sasaran dalam dilakukannya kolaborasi antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH yang diprioritaskan adalah orang-orang dengan resiko tinggi akan tertularnya HIV/AIDS seperti WPS, Gay, Waria, dan sebagainya atau yang disebut dengan populasi kunci. Selanjutnya mengenai cara menentukan kelompok sasaran sudah cukup

baik terbukti dari data terbaru yang selalu dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan LSM LPPSLH kepada KPA Kabupaten Banyumas sehingga dapat membantu dalam menyusun dan menentukan kelompok sasaran dari upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas.

- E. Tingkat Institusional yang ditekankan pada dua sub aspek yaitu peran antar institusi dan koordinasi dalam pembagian kerja sudah cukup baik dan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing institusi. KPA sebagai koordinator tetap menjaga koordinasi dengan LSM dalam menjalankan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sedangkan LSM LPPSLH sudah bekerja sesuai dengan perannya yaitu melakukan penjangkauan kepada kelompok sasaran dan pendampingan. Koordinasi dalam pembagian kerja juga sudah cukup baik, hal tersebut terbukti dari masih berjalannya kegiatan penanggulangan HIV/AIDS seperti kegiatan sosialisai bahaya HIV/AIDS yang dapat berlangsung tanpa adanya konflik atau hambatan yang menghalangi dari kegiatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses *Collaborative Governance* penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam melakukan kegiatan serta program-program penanggulangan HIV/AIDS dilakukan dengan kerjasama yang cukup baik. Meskipun kolaborasi yang terjalin antara KPA Kabupaten

Banyumas dengan LSM LPPSLH sudah cukup baik akan tetapi ini belum mampu menurunkan angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas secara signifikan, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selain faktor minimnya anggaran, hal yang menyebabkan masih tingginya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan HIV/AIDS pada klinik VCT maupun klinik IMS.

B. Implikasi

Kolaborasi yang dilakukan antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sudah cukup baik, karena kolaborasi yang dilakukan antara KPA Kabupaten Banyumas dengan LSM LPPSLH tersebut dapat berjalan tanpa adanya konflik yang berarti, KPA sebagai koordinator juga dapat mengkoordinir para *stakeholder* dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri keberhasilan kolaborasi tidak sertamerta dapat menurunkan angka HIV/AIDS secara singkat, hal tersebut disebabkan karena masih terbatasnya sumberdaya keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan HIV/AIDS .

Pemerintah Kabupaten Banyumas seyogyanya dapat meningkatkan anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS agar pihak LSM tidak lagi tergantung kepada lembaga donor luar negeri, sehingga akan tercipta akuntabilitas dan keterikatan antara LSM terhadap pemerintah untuk

meningkatkan efektivitas kolaborasi. Selain itu dari Dinas Kesehatan di harapkan mengadakan sosialisasi bukan hanya terhadap kelompok beresiko saja akan tetapi juga kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan bahaya HIV/AIDS akan terbangun dengan sendirinya.

